

**POTRET IRISAN BUMI DESA TONRONG RIJANG DALAM TRANSECT
PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

***PORTRAIT OF EARTH SLICES IN TONRONG RIJANG VILLAGE IN
TRANSECT ON PARTICIPATORY DEVELOPMENT PLANNING***

Ahmad Mustanir¹⁾, Akhmad Yasin²⁾, Irwan³⁾, Muhammad Rusdi⁴⁾

^{1) 2) 3)}Dosen Ilmu Pemerintahan STISIP Muhammadiyah Rappang

⁴⁾Dosen Ilmu Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Rappang
E-mail: ahmadmustanir74@gmail.com

ABSTRAK

Sangat penting mengetahui penggunaan metode Transect sebagai metode perencanaan partisipatif dalam penggalian potensi dan permasalahan secara visual serta praktek pada perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan metode Transect akan dapat diketahui gambaran irisan bumi Desa Tonrong Rijang untuk didiskusikan lebih lanjut dalam membuat sebuah perencanaan pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara mendalam serta melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif. Teknik ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transect merupakan hal yang baru dan tidak dikenal oleh masyarakat desa dalam sebuah perencanaan pembangunan. Proses interaksi sosial masyarakat terjadi dalam perencanaan pembangunan serupa dengan transect, seperti saat melakukan pendampingan kepada 'pihak luar' dalam kegiatan tertentu, tetapi kegiatan dominan hanya dalam bentuk musyawarah mufakat seperti yang telah lazim dan turun temurun dilakukan. Potret irisan bumi Desa Tonrong Rijang merupakan wilayah datar 100%. Sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan tingkat kesuburan tanah rata-rata sedang. Luas wilayah Desa Tonrong Rijang ditaksir sekitar 340 ha/m². Areal paling luas dipergunakan untuk persawahan yaitu sekitar 221,31 Ha/m² dengan sawah irigasi teknis yang lebih luas dibandingkan sawah tadah hujan dan pemukiman seluas 41,28 Ha/m². Hampir tidak ada lahan yang digunakan untuk kolam tambak ataupun lahan kritis.

Kata Kunci: *Irisan Bumi, Partisipasi Masyarakat, Partisipatif, Perencanaan Pembangunan, Transect*

A. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, dimana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat desentralisasi membuka era baru bagi pemerintahan daerah. Dimana dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia saat ini menggunakan dua pendekatan *top down* dan *bottom up* tujuannya untuk menjamin keseimbangan antara prioritas Nasional dengan aspirasi prioritas lokal, walaupun pada kenyataannya sebagian besar daerah belum mengakomodasi aspirasi lokal dikarenakan sebagian besar program yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Sistem perencanaan pembangunan Nasional Indonesia yang meliputi pendekatan *top down* dan *Bottom up*, diatas kertas nampaknya akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas Nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan

pembangunan daerah. Namun, kenyataannya banyak daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi lokal, karena sebagian besar proposal yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Akibatnya, proposal akhir yang masuk ke pusat biasanya di dominasi oleh program yang diajukan oleh level pemerintahan yang lebih tinggi khususnya pemerintah provinsi dan pusat (Kuncoro, 2004:58).

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan di implementasikannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diharapkan semua program pembangunan daerah akan terintegrasi dengan perencanaan program pembangunan Nasional. Untuk hal tersebut, unsur pemerintahan dan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam melakukan terobosan-terobosan yang mengarah pada perbaikan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara yang cukup relevan untuk mengkaji

kondisi lingkungan pedesaan adalah dengan penerapan pendekatan *Transect*, dengan harapan akan tercipta sebuah sistem perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dalam proses pengelolaan sumber daya yang ada khususnya di wilayah pedesaan. *Transect* ini adalah salah satu metode dari *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Bisa dikatakan sebagai pendekatan, metode atau teknik, karena di dalamnya memang terdapat unsur-unsur tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa teknik-teknik identifikasi, pengukuran dan pelibatan masyarakat secara partisipatif (Asep Supriatna, 2014).

Pendekatan partisipatif yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan cara menyusun rencana program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Mustanir, Ahmad, Abadi, 2016).

Tetapi seperti yang dikemukakan oleh Marbyanto (2008), sebagai berikut: Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan masih menjadi retorika. Kegiatan perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi

kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim.

Pada beberapa kegiatan baik observasi maupun dalam beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tonrong Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang peneliti melihat pendekatan partisipatif dilakukan dengan cara partisipasi dimaknai, yaitu “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dari definisi ini penulis melihat bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat yang rendah di Desa Tonrong Rijang dapat mengakibatkan perencanaan pembangunan tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. *Transect* adalah salah satu metode untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian *Transect*

Asep Supriatna (2014:43) menyebutkan dalam pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), penelusuran lokasi (*transect*) sangat penting untuk melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan dan sumberdaya masyarakat, dengan cara melakukan perjalanan bersama menelusuri wilayah desa. Melakukan *transect* diawali dari lokasi dengan titik dengan ketinggian terendah menuju ke titik tertinggi di desa yang diamati atau disesuaikan dengan kesepakatan warga masyarakat. Hasil penelusuran lokasi selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah bagan yang disebut Bagan *Transect* yang berupa gambar irisan lahan yang dilalui, sekaligus menggambarkan ketinggian lokasi dan aktivitas perekonomian masyarakat pada berbagai ketinggian tersebut.

Data-data yang dicatat antara lain: ketinggian lokasi, Sumber Daya Alam (SDA), obyek-objek penting, permasalahan yang dihadapi masyarakat dan lingkungan, kondisi teknis, sosial, dan perekonomian masyarakat, keadaan sarana dan prasarana umum dan sebagainya.

Transek adalah teknik pengamatan langsung lingkungan dan sumberdaya masyarakat, dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang disepakati. Hasil pengamatan dituangkan kedalam bagan atau gambar irisan muka bumi untuk didiskusikan

lebih lanjut (Uddin, M.N. dan N. Anjuman, 2013 :73-74).

Manfaat transek yaitu untuk melihat dengan jelas mengenai kondisi alam dan rumitnya sistem pertanian dan pemeliharaan sumber daya alam yang terbatas yang dijalankan masyarakat (Haddy, 1986).

2. Perencanaan Pembangunan

Sjafrizal (2014 :24) perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Arthur W. Lewis mendefinisikan perencanaan pembangunan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Salah satu kegiatan perencanaan pembangunan yang biasanya dilaksanakan adalah musyawarah perencanaan pembangunan, yaitu forum-forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. (Tim Kerja Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang, 2008:3) (Mustanir & Lubis, 2017).

Musyawah perencanaan pembangunan merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku

kepentingan lainnya. Musyawarah perencanaan pembangunan yang menurut Sumpeno (2008:28) merupakan perencanaan pembangunan bersama masyarakat adalah merupakan panduan atau model pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

3. Konsep Partisipasi dan Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita (2006:34) Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Slamet sebagaimana dikutip oleh Suryono (2001:124) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta pemanfaatan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Selanjutnya, menurut Adisasmita (2006:41) Partisipasi Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi Program Pembangunan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga, sebagai individu maupun

kelompok sosial dan warga, mengambil peran, serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Mustanir & Razak, 2017).

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagai salah satu tujuan SPPN Pasal 2 ayat 4 huruf d) memaknai "partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan."

Dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam

mengevaluasi perubahan yang terjadi. (Mustanir, Abadi, & Nasri, 2016).

Selanjutnya Slamet (2002:8) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

4. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

(World Bank, 1995) menjelaskan PRA merupakan suatu proses dalam menganalisis, perencanaan dan tindakan. Bank Dunia mendefinisikan PRA sebagai pendekatan partisipatif dan metode yang menekankan pengetahuan lokal dan memungkinkan masyarakat setempat untuk melakukan penilaian, analisis dan perencanaan mereka sendiri. PRA menggunakan visualisasi dan latihan untuk memfasilitasi berbagai informasi, analisis dan tindakan antara para *stakeholders* (Uddin, M.N. dan N. Anjuman:2013).

Alam dan Ishan (2012) *PRA is the most suitable and appropriate method to indentify the existing situation of the community*. Bahwa PRA merupakan metode yang paling cocok dan sesuai untuk mengidentifikasi situasi yang ada di masyarakat.

Participatory Rural Appraisal (PRA) seringkali dilekatkan dengan nama *Robert Chambers*, sehingga rasanya perlu dipahami peran *Robert Chambers* dalam pengembangan PRA.

Chambers memperkenalkan metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)* sebagai alternatif bagi para praktisi pembangunan yang memerlukan sebuah metodologi ‘penelitian’ yang bisa membantu mereka memahami masyarakat secara cepat, dengan informasi aktual, dan biaya murah, serta bisa mengajak masyarakat sebagai pelaku penelitian itu sendiri (Chambers, 1992)

Pada bukunya yang kedua Chambers menggunakan istilah *Participatory Rural Appraisal (PRA)* untuk menggantikan RRA. Perkembangan konsep RRA sampai PRA terutama pada pemikiran mengenai peran ‘Orang Luar’ (para ‘profesional’) bekerja di masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pembangunan (Adisasmita, 2013:8).

Meskipun terdapat berbagai sumber PRA, nampaknya RRA adalah sumber PRA yang paling langsung. PRA adalah metamorfosis dari RRA, sehingga PRA semula disebut dengan istilah ‘RRA partisipatif’ (berkembang tahun 1980-an) (Chambers, 2007).

C. METODE

Studi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif *explanatory* yang merupakan kombinasi antara penelitian deskriptif dan penelitian *explanatory*. Kedua tipe penelitian ini digunakan untuk menemukan jawaban yang menyeluruh atas pertanyaan penelitian dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi

transect sebagai metode pada perencanaan pembangunan partisipatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Keith Punch (2006), Model karakteristik penelitian kualitatif akan sangat memudahkan peneliti dalam menemukan dan memahami pertanyaan penelitian.

Seperti yang disebutkan oleh Creswell (2009), peneliti dapat menggunakan *multiple methods that are interactive and humanistic*. Creswell (2013:167) mengemukakan alasan menggunakan metode kualitatif karena pendekatan ini memiliki kelebihan dalam mengungkap fenomena dari kebiasaan lazim pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, karena pendekatan kualitatif mempunyai fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian. Penelitian kualitatif juga dapat memberi kesempatan ekspresi dan penjelasan yang lebih besar dalam bentuk penafsiran berdasarkan kepastian intuitif secara logis. Pada penelitian kualitatif peneliti juga dapat sekaligus berperan sebagai participant observer (partisipan pengamat) dengan kegiatan seperti mencatat, merekam dan mengamati (Jamaluddin Ahmad, 2015:52).

1. Sumber Data

Sumber data adalah objek dimana data diperoleh untuk mempermudah dalam pengklasifikasikan data. Menurut Lofland dalam Moleong

(2006:157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dijelaskan juga bahwa sumber data diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: *Person, Place, dan Paper*. Dalam penelitian ini salah satu sumber data yang diperlukan adalah informan. Menurut Moleong (2006:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan data tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Untuk mengambil sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2009:96) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok di gunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup, dan kredibilitas untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dalam pelaksanaan wawancara. Adapun key Informan dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD. Selain itu untuk melengkapi data penulis di ambil

pula informan adalah aparaturnya desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: Observasi, proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan atas penggunaan metode lazim yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, penggunaan metode *transect* sebagai metode partisipatif, serta upaya pelibatan semua elemen masyarakat dan pihak terkait dalam berbagai perencanaan pembangunan yang partisipatif. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan *transect*, dan perencanaan pembangunan partisipatif.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya

dianalisis dengan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif (*Interactive Model Of Analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono:2015). Teknik tersebut mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. analisis datanya, yaitu *Collection Data, Reduction Data, Display Data, dan Conclusion Drawing/Verifying*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang dilakukan di Desa Tonrong Rijang pada upaya penyusunan perencanaan pembangunan, penelusuran lokasi (*transect*) dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan dan sumberdaya masyarakat. Cara ini dilakukan dengan melakukan perjalanan bersama tokoh-tokoh masyarakat menelusuri wilayah desa dengan jalur-jalur yang telah disepakati sebelumnya. Istilah *transect* sekalipun merupakan hal yang baru dalam masyarakat. Namun kegiatan dengan model *transect* seperti ini adalah sesuatu hal yang telah lazim dilakukan oleh masyarakat jika ingin melihat suatu kondisi atau kegiatan di bagian wilayah desa mereka.

Desa Tonrong Rijang memiliki 2 Dusun, 4 RW dan 9 RT. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang

pernah dilakukan dengan metode *transect* saat melaksanakan sebuah kegiatan perencanaan pembangunan diawali dari lokasi Dusun Mattonrong Salo dengan mengitari 2 RW dan 5 RT selanjutnya di Dusun Tonrong Rijang dengan mengitari 2 RW dan 4 RT. Kegiatan ini melibatkan banyak unsur masyarakat.

Hasil penelusuran lokasi yang dilakukan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah bagan irisan bumi yang disebut Bagan *Transect* yang berupa gambar irisan lahan yang dilalui, sekaligus menggambarkan ketinggian dan rendahnya lokasi dan aktivitas perekonomian masyarakat pada berbagai titik ketinggian dan rendahnya lokasi tersebut.

Data-data yang dicatat saat transect tersebut antara lain: ketinggian dan rendahnya lokasi, sumber daya alam yang tersedia, objek-objek penting, permasalahan yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya, kondisi teknis, sosial, budaya dan perekonomian masyarakat, keadaan sarana dan prasarana umum dan lain sebagainya.

Hasil dari penelusuran lokasi (*transect*) diperoleh gambaran Desa Tonrong Rijang merupakan wilayah datar 100%. Sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan tingkat kesuburan tanah rata-rata sedang. Luas wilayah Desa Tonrong Rijang ditaksir sekitar 340 Ha/m². Areal paling luas dipergunakan untuk

persawahan yaitu sekitar 221,31 Ha/m² dengan sawah irigasi teknis yang lebih luas dibandingkan sawah tadah hujan dan pemukiman seluas 41,28 Ha/m². Hampir tidak ada lahan yang digunakan untuk kolam tambak ataupun lahan kritis. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah penduduk menurut data terakhir adalah 657 perempuan dan 670 laki-laki, jumlah keseluruhan 1.327 orang. Mata pencaharian penduduk yang dominan adalah petani dan buruh tani, dengan sedikit diantaranya adalah karyawan swasta dan pegawai negeri sipil, pengusaha kecil, serta pengrajin industri rumah tangga. Jumlah kepadatan penduduk 390/km².

Dari segi infrastruktur saat *transect* dilakukan memperlihatkan jalanan yang merupakan sarana transportasi untuk pengangkutan, baik untuk hasil-hasil pertanian dan juga untuk kelancaran pengangkutan perdagangan merupakan sarana vital sebagai penunjang aktifitas masyarakat. Beberapa jalan di desa sedikit mengalami kerusakan, sehingga hal ini menjadi sebuah masalah dalam menunjang aktifitas ekonomi maupun aktifitas keseharian masyarakat sebagai pengguna jalan. Salah satu penyebab rusaknya jalan di desa adalah setiap tahunnya terjadi genangan banjir yang tiap tahunnya terjadi ini diperparah dengan rusak dan tidak berfungsinya dengan baik saluran. Juga saluran air yang berfungsi sebagai aliran air untuk menyalurkan luapan air ketika musim hujan dan sebagai saluran untuk

mengalirkan pembuangan limbah rumah tangga belum maksimal dibangun.

Gambaran yang diperoleh diatas adalah salah satu hasil dari penelusuran wilayah atau *transect* yang dilakukan di Desa Tonrong Rijang. Hasil dari *transect* tersebutlah yang kemudian dibawa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Jika melihat hasil dari *transect* maka ini sesuai dengan teori sebelumnya yang utarakan oleh Asep Supriatna, Uddin, M.N dan N, Anjuman bahwa transek yang merupakan pengamatan terhadap lingkungan secara langsung, yang bila dituangkan dalam bagan gambar irisan bumi dapat menggambarkan kondisi wilayah dengan berbagai data seperti tinggi rendahnya lokasi lahan, sumber-sumber daya alam yang ada di desa, kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonominya, keadaan sarana dan prasarana umum di desa, budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta hal-hal lainnya yang di butuhkan pada saat penyusunan sebuah rencana pembangunan.

Transect seperti halnya musyawarah mufakat bagi aparat pemerintah desa juga merupakan wadah penjangingan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, karena saat *transect* dilakukan terjadi interaksi berupa percakapan ataupun dialog antar warga masyarakat. Walaupun *transect* dilakukan di tingkat desa atau paling tidak di tingkatan dusun, penjangingan aspirasi masyarakat, masalah dan

kebutuhan masyarakat tidak mengabaikan aspirasi masyarakat dari tingkat dibawahnya. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa:

“Walaupun kami sudah berusaha mengakomodasi semua permasalahan dan kebutuhan warga di tingkatan bawah seperti RT, namun kami juga mengalami hal yang sulit untuk dapat mengakomodasi semua masalah dan kebutuhan warga di tingkat RT tersebut. Olehnya kami melakukan pertemuan warga di tingkat dusun ataupun desa dengan peserta para ketua RW beserta pengurusnya, asumsinya bahwa masing-masing ketua RW dapat memahami dan tahu betul apa yang menjadi masalah, potensi serta kebutuhan masyarakatnya. Dalam mengakomodasi semua masalah dan kebutuhan warga itu juga dilakukan dengan kegiatan berupa penelusuran wilayah”

Hal ini juga seperti yang di utarakan oleh Ketua BPD Desa Tonrong Rijang:

“Memang idealnya masyarakat secara keseluruhan mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka berdasarkan permasalahannya, tetapi karena keterbatasan waktu, tempat dan kesibukan dari warga yang tidak memungkinkan diadakannya pertemuan warga di tingkat RT atau lebih rendah dari itu dan saya rasa ini cukup mewakili apa yang dibutuhkan seluruh warga”.

Walaupun salah seorang tokoh masyarakat, mengemukakan:

“Segala permasalahan dan kebutuhan masyarakat sendiri yang tahu, oleh karena itu penjangkaran aspirasi dengan metode apapun (musyawarah warga atau transect) harus dilakukan secara menyeluruh terhadap masyarakat. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap barulah dibuat daftar prioritas dari semua masalah dan kebutuhan yang telah diperoleh, penentuan prioritas penanganan pun harus dilakukan oleh masyarakat.”

E. SIMPULAN

Transect adalah hal yang baru dan tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat desa dalam sebuah perencanaan pembangunan. Walaupun kegiatan dengan model seperti ini lekat dalam keseharian masyarakat saat merencanakan pembangunan desanya. *Transect* pernah dilakukan saat kegiatan pendampingan masyarakat dengan beberapa hasil yang dibawa ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Proses interaksi sosial masyarakat banyak terjadi dalam perencanaan pembangunan serupa dengan *transect*, seperti saat melakukan pendampingan kepada ‘pihak luar’ dalam kegiatan tertentu, tetapi kegiatan dominan hanya dalam bentuk musyawarah mufakat seperti yang telah lazim dan turun temurun dilakukan. *Transect* seperti halnya musyawarah mufakat bagi aparat pemerintah desa juga merupakan wadah penjangkaran aspirasi dan

kebutuhan masyarakat, karena saat *transect* dilakukan terjadi interaksi berupa percakapan ataupun dialog antar warga masyarakat. Potret irisan bumi Desa Tonrong Rijang merupakan wilayah datar 100%. Sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan tingkat kesuburan tanah rata-rata sedang. Luas wilayah Desa Tonrong Rijang ditaksir sekitar 340 Ha/m². Areal paling luas dipergunakan untuk persawahan, yaitu sekitar 221,31 Ha/m² dengan sawah irigasi teknis yang lebih luas dibandingkan sawah tadah hujan dan pemukiman seluas 41,28 Ha/m². Hampir tidak ada lahan yang digunakan untuk kolam tambak ataupun lahan kritis di desa ini.

F. ACKNOWLEDGEMENT

Terimakasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas bantuan pendanaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami dalam mengikuti Hibah Penelitian Dosen Pemula 2018.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Perdesaan. Pendekatan Partisipatif Tipologi*

- Strategi Konsep Desa* Isbandi. (2007). *Perencanaan Pertumbuhan* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Jamaluddin. (2015) *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Alam, A. and Ishan, S. (2012). *Role of Participatory Rural Appraisal in Community Dvelopment (A Case Study of Barani Area Development Project in Agriculture, Live Stock and Forestry Development in Kohat)*. Int. J. Acad. Res. Busi. & Soc. Sci. 2 (8): 25-38.
- Chambers, Robert. (1992). *Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius dan Oxfam.
- Chambers, Robert. (2007). *From PRA to PLA and Pluralism: Practice and Theory*. Working Paper #286, Institute of Development Studies, University of Sussex, Sussex, UK. pp. 7-12.
- Creswell, John W. (penerjemah Achmad Fawaid). (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haddy. (1986). *Fisiologi Tumbuhan*, UMM Press, Malang
- KMW PNPM P2KP. (2014). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Alternatif Metodologi Partisipatif*. Disarikan dari *Participatory, Pemberdayaan dan Demokrasi Komunitas*. Studio Driya Media dan KPMNT.
- Kuncoro, Mudradjad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Lewis, Arthur. *Development Planning*, New York: Harper & Row.
- Marbyanto, Edy. Masalah dalam perencanaan (Refleksi singkat untuk kasus perencanaan dan penganggaran di Kaltim) ([http//edy-marbyanto.blogspot.com](http://edy-marbyanto.blogspot.com)) diakses 19 Maret 2016.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustanir, Ahmad; Abadi, P. (2016). **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG**

- SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. Retrieved from <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986>.
- Mustanir, A., Abadi, P., & Nasri, A. (2016). Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan. In *International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)* (Vol. 84, pp. 356 – 359). Makassar: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.79>
- Mustanir, A., & Lubis, S. (2017). Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning. In *International Conference On Democracy, Accountability, and Governance (ICODAG 2017)* (Vol. 163, pp. 316–319). Pekanbaru: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>.
- Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2017). Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*.
- Punch, Keith. (2006). *Developing Effective Research Proposals*, Second Edition. Sage Publication, hal. 33-35.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Slamet, Y. (2002). *Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. Yogyakarta: PAU-SS UGM.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Edisi Revisi. Cetakan Ke 17. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Cetakan Ke 7. Bandung : Alfabeta.
- Sumpeno, Wahyudin. (2015). *Perencanaan Desa Terpadu (Panduan Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat)*. Jakarta: CRS Indonesia.
- Supriatna, Asep. (2014). Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal Dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Desa. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. Edisi 1 No. 1, Jan – Mar 2014, ISSN: 2355-4118. h.39-45.

Suryono, Agus. (2001). *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: UM Press.

Tim Kerja. (2008). *Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang*.

Tjokroamidjojo. (1991). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Uddin, M.N. and N. Anjuman. (2013). *Participatory rural appraisal approaches: an overview and an exemplary application of focus group discussion In climate change adaptation and mitigation strategies*. Int. J. Agril. Res. Innov. & Tech. 3 (2): 72-78, December, 2013.

World Bank. (1995). *The Participation Sourcebook*. Washington DC: World Bank. h. 175.

Dokumen-Dokumen :

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.